

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

Redi Herawan

NPP. 32.0396

Asdaf Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: rediherawan2017@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The condition of road infrastructure in Garut Regency, which still suffers from significant damage despite being a policy priority supported by substantial budgeting and planning, indicates a gap between planning and on-the-ground implementation that impacts mobility, regional connectivity, and local economic growth. Purpose:* *The aim of this research is to evaluate the implementation of road development and improvement policies and to examine their impact on community welfare. Method:* *The method used is descriptive qualitative, analyzing the evaluation of road infrastructure development and improvement in Garut Regency. Data is obtained through interviews, observations, and documentation, using purposive sampling techniques from relevant agencies such as the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), the Regional Development Planning Agency of Garut Regency, and the community, utilizing the policy evaluation theory proposed by William N. Dunn (2003) with six dimensions of analysis: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Results:* *The research findings indicate that although there has been an improvement in road quality each year, the implementation of policies still faces challenges, such as budget constraints, difficult geographical conditions, and suboptimal inter-sectoral coordination. Conclusion:* *The implementation of road development and improvement policies in Garut Regency shows suboptimal results. Despite significant budget allocation, many road segments remain in poor condition, especially in remote areas.*

Keywords: *Policy Evaluation, Road Infrastructure, Regional Development*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Garut yang masih banyak mengalami kerusakan, meskipun telah menjadi prioritas kebijakan dengan dukungan anggaran dan perencanaan yang cukup besar, menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi di lapangan yang berdampak pada terganggunya mobilitas, konektivitas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Tujuan:* *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta menelaah dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Metode:* *Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisis evaluasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta informan menggunakan teknik purposive sampling dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Garut, dan masyarakat dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) dengan enam dimensi analisis: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil/Temuan:* *Hasil penelitian menunjukkan bahwa*

meskipun terdapat peningkatan dalam kualitas jalan setiap tahunnya, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut menunjukkan hasil yang belum optimal. Meskipun terdapat alokasi anggaran yang signifikan, banyak ruas jalan masih dalam kondisi kurang baik, terutama di daerah terpencil.

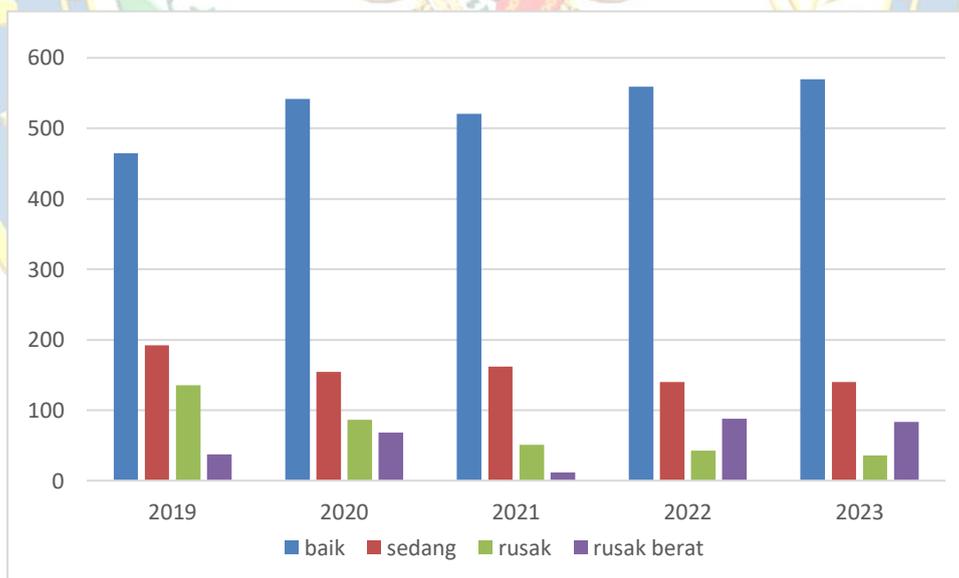
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Infrastruktur Jalan, Pembangunan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, jalan berfungsi sebagai infrastruktur transportasi yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek pemerintahan serta sebagai fasilitas negara yang mendukung kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019–2024 sebagai bentuk penyesuaian arah pembangunan daerah terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah yang berkembang. Pemerintah Kabupaten Garut memberikan anggaran sebesar Rp 426 miliar untuk dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan alokasi paling besar untuk infrastruktur jalan (Bappeda, 2019). Kabupaten Garut mempunyai kekurangan yaitu pada pemerataan Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan terutama didaerah terpencil, dan juga masih masih fluktuatifnya kondisi jalan di Kabupaten Garut (Garutintanews.com, 2024). Hal ini berbanding lurus dengan data jalan di Kabupaten Garut sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kondisi Jalan di Kabupaten Garut



Sumber : LAKIP dinas PUPR 2024

Di dalam gambar tersebut diterangkan bagaimana kondisi jalan Kabupaten Garut bahwa pada tahun 2019, panjang jalan baik mencapai 464,61 km, sementara jalan rusak dan rusak berat masing-masing 135,32 km dan 37,02 km. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan jalan baik menjadi 541,62 km, tetapi jalan rusak juga mengalami fluktuasi, dengan 86,61 km rusak. Meski jalan baik terus meningkat hingga 569,83 km pada 2023, 30% dari jalan masih dalam

kondisi rusak ringan hingga berat, lebih tinggi dari rata-rata provinsi.

Dalam konteks infrastruktur, kondisi jalan yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Meskipun pemerintah Kabupaten Garut telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, tantangan dalam pemerataan dan perbaikan jalan di daerah terpencil tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Fluktuasi kondisi jalan yang tinggi menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut, dengan fokus pada aspek efektivitas, efisiensi, dan pemerataan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif, sehingga aksesibilitas jalan dapat ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil yang selama ini terpinggirkan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan penelitian dalam skripsi ini terletak pada kurangnya perhatian terhadap evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di daerah terpencil. Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang menilai efektivitas kebijakan infrastruktur di daerah lain, seperti evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan di Surabaya (Zahra et al., 2024) fokus tersebut belum sepenuhnya diterapkan di Kabupaten Garut. Penelitian sebelumnya sering kali hanya menyoroti aspek fisik pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, terutama di wilayah yang terpencil dan kurang terlayani. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi bagaimana kebijakan yang ada dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Hal ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah secara mandiri dan fleksibel (Lambelanova, 2022).

Selain itu, meskipun ada peningkatan dalam panjang jalan yang baik dari tahun ke tahun, kondisi jalan rusak dan rusak berat tetap fluktuatif, menunjukkan adanya tantangan yang belum teratasi dalam implementasi kebijakan (Garutintannews.com, 2024). Keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit, dan kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor penghambat yang perlu diperhatikan (Martauli et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi strategis yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis dalam pembuatan penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang menarik akan tetapi masih terdapat celah untuk dikaji lebih dalam lagi. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa karya terdahulu yang relevan. Pertama, **Hakim (2015)** dalam skripsinya berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Surabaya* menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan di Surabaya belum optimal. Kesenjangan muncul karena kurangnya perhatian terhadap aspek kualitas pemeliharaan di beberapa ruas jalan, menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali informasi mendalam. Kedua, **Ridha et al. (2021)** dalam penelitian berjudul *Evaluasi Kebijakan*

Pelaksanaan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Korban Gempa Bumi di NTB menunjukkan bahwa meskipun terdapat dana bantuan yang memadai, lambatnya proses validasi berdampak negatif pada distribusi penyaluran dana. Gap penelitian terletak pada fokus yang terbatas pada infrastruktur perumahan, dengan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, **Haqqi (2023)** dalam *Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Kendal* mencatat bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan jalan, namun terdapat gap dalam analisis dampak jangka panjang terhadap ekonomi lokal, menggunakan metode kualitatif deskriptif. **Sarah & Subadi (2021)** dalam penelitian berjudul *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong* menemukan bahwa evaluasi kebijakan berjalan cukup baik, tetapi masih banyak kekurangan dalam hal pemeliharaan, dengan fokus yang terbatas pada infrastruktur desa dan menggunakan metode kualitatif interaktif. Terakhir, **Mahliani et al. (2018)** dalam *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong* menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan terlaksana dengan cukup baik, tetapi tidak mengatasi masalah kerusakan jalan di daerah pelosok. Gap penelitian ini terletak pada kurangnya perhatian terhadap dampak sosial dari pengelolaan dana desa, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui studi-studi ini, penelitian saat ini berupaya mengisi celah yang ada dengan fokus pada evaluasi kebijakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut serta dampaknya terhadap masyarakat secara lebih komprehensif. **Primanto & Undang (2022)** berjudul "Impact Evaluation of the Road Infrastructure Development Policy in Improving the Quality of Education Services in Indonesia" menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang diterapkan pemerintah antara tahun 2010-2019 belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan. Meskipun anggaran untuk infrastruktur meningkat, jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan justru mengalami penurunan, dan tingkat putus sekolah tetap tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan analisis data dari BPS, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan, serta perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Teori yang menjadi acuan meliputi evaluasi kebijakan oleh Patton, Sawicki, dan Clark, serta konsep evaluasi dampak yang dikemukakan oleh Samudra Wibawa. **Ardik (2021)** pada tahun 2025 berjudul "A Critical Analysis of Malang City Government Policy on Road Repair Targets: An Evaluation of Infrastructure Performance Based on Dunn's Model" mengkaji implementasi kebijakan perbaikan jalan di Kota Malang dengan menggunakan model evaluasi oleh William N. Dunn. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah mencapai tingkat kualitas jalan yang tinggi, distribusi perbaikan masih tidak merata akibat kendala anggaran, cuaca, dan sumber daya manusia yang terbatas. Penelitian ini merekomendasikan integrasi data yang lebih baik, perencanaan anggaran yang adaptif, dan peningkatan partisipasi publik untuk mengoptimalkan upaya perbaikan infrastruktur di Kota Malang. **Kuncoro et al. (2024)** berjudul "The Impact of Road Infrastructure Development on Ecosystems and Communities" mengkaji dampak pembangunan infrastruktur jalan Arfai-Pami di Manokwari Selatan. Metode yang digunakan adalah campuran kualitatif dan kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan jalan meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan nilai variabel sosial meningkat 0.365 dan variabel ekonomi 0.759, terdapat konsekuensi negatif seperti penurunan area hutan sebesar 33.87%, peningkatan polusi, dan gangguan habitat. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan infrastruktur dan pelestarian ekosistem, serta perlunya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan proyek.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus yang mendalam terhadap evaluasi kebijakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan, tetapi juga menganalisis dampak sosial dan ekonominya secara komprehensif, termasuk aspek responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn dan mengaplikasikan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan infrastruktur dapat lebih responsif dan inklusif, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Dunn, 2003).

1.5 Tujuan

Tujuan dari terciptanya penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Nugrahayu et al., 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif. Model ini dipandang paling fleksibel karena memungkinkan terjadinya perubahan ditengah pelaksanaan penelitian, sehingga dapat diarahkan pada tujuan utama penelitian (Simangunsong, 2017). Pendekatan penelitian merupakan tahapan yang krusial yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti sebelum melakukan penelitiannya. Pendekatan penelitian adalah prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi umum hingga metode pengumpulan data yang terperinci, analisis, dan interpretasi (Creswell & Creswell, 2023). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara komprehensif atau menyeluruh dan mendalam mengenai suatu kebijakan (Anjani et al., 2019). Penelitian deskriptif umumnya digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen, catatan lapangan, foto, video, wawancara, dan catatan lainnya (Moleong, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut serta dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menangkap realitas kebijakan secara utuh melalui data naratif dan pemahaman kontekstual terhadap kebijakan publik yang tidak dapat diukur hanya dengan angka atau statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun terdampak oleh kebijakan, terutama dalam aspek implementasi, kendala, dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan evaluatif.

Instrumen penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, proses ini mencakup penyusunan pertanyaan, prosedur pengumpulan data dari partisipan, serta interpretasi terhadap makna dari data yang diperoleh (Dewi et al., 2025). Sejalan dengan pendapat (Creswell & Creswell, 2023), penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan, mendengarkan narasi, meminta klarifikasi, serta merekam dan mengumpulkan data. Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, yang

dibantu dengan perangkat pendukung seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, alat tulis, dan perangkat elektronik. Sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi langsung dengan pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut (Sugiyono, 2013). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi pemerintah daerah, laporan kegiatan, situs resmi Kementerian Investasi/BKPM dan dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta literatur lain seperti artikel, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan program pengembangan iklim investasi dan penanaman modal.

Dalam penelitian ini informan ditentukan secara purposive, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pengetahuan, posisi, dan keterlibatannya dalam kebijakan pembangunan jalan di Kabupaten Garut. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Bidang Bina Marga, karena memiliki otoritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan. Mereka dipilih sebagai informan kunci karena peran strategisnya dalam pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan kebijakan. Selain itu, peneliti juga mewawancarai informan pendukung, yaitu perwakilan dari Bappeda yang berperan dalam penyusunan dokumen RPJMD, aparat kecamatan dan kepala desa di wilayah yang menjadi lokasi pembangunan jalan, serta masyarakat pengguna jalan. Pemilihan informan masyarakat bertujuan untuk mengetahui persepsi langsung dari pihak yang terdampak terhadap perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan lokasi spesifik di beberapa kecamatan yang menjadi sasaran utama pembangunan dan rehabilitasi jalan sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024. Alasan pemilihan lokasi ini karena Kabupaten Garut merupakan wilayah dengan karakteristik geografis kompleks serta tingkat kebutuhan infrastruktur jalan yang tinggi. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai pada bulan Januari hingga Maret 2025. Selama periode tersebut, peneliti melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen pendukung dari instansi terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam kepada informan, observasi langsung terhadap kondisi jalan di lapangan, dan dokumentasi kebijakan serta laporan pelaksanaan program pembangunan jalan. Wawancara digunakan untuk menggali perspektif dan pengalaman para pelaku kebijakan maupun masyarakat pengguna jalan. Observasi digunakan untuk memverifikasi kondisi jalan secara faktual di lokasi penelitian, sedangkan dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data sekunder seperti RPJMD, laporan Dinas PUPR, dan data statistik dari Bappeda. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles & Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menelaah tentang optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui konsep *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash (2008), dengan melihat empat dimensi yang dianalisis yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang memfasilitasi, dan proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008) dan dibahas sebagai berikut :

3.1 Efektifitas

Dimensi efektivitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut belum mencapai hasil yang maksimal. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, panjang jalan yang dikategorikan baik hanya mencapai 464,61 km, sedangkan pada tahun 2023, meskipun ada peningkatan menjadi 569,83 km, masih terdapat 30% dari total jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat (Garutintannews.com 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara rencana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan realisasi di lapangan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dr. Agus Ismail, menegaskan bahwa proyek jalan yang telah diperbaiki di beberapa kecamatan masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Misalnya, jalan di Kecamatan Singajaya masih banyak yang rusak, dengan tingkat kerusakan mencapai 12,19 km dari total panjang jalan yang ada. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perbaikan, efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara menyeluruh belum tercapai. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, penting bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada perencanaan yang komprehensif, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa semua ruas jalan, terutama yang berada di daerah terpencil, mendapatkan perhatian yang sama. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, sehingga manfaat dari pembangunan jalan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.2 Efisiensi

Dimensi efisiensi dalam penelitian ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut. Pengelolaan anggaran yang efisien sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tabel 3.1 Anggaran Infrastruktur Jalan di Kabupaten Garut

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2020	191.175.744.939,00	95,18%
2	2021	210.456.264.462,37	96,20%
3	2022	320.731.547.554,00	96,20%
4	2023	280.565.714.448,00	99,96%
5	2024	62.937.280.292,00	95,65%

Sumber : Diolah penulis dari LAKIP dinas PUPR 2025

Pengelolaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut belum optimal. Data anggaran dari tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa realisasi anggaran tidak mencapai 100%, bahkan ada penurunan pada tahun 2024. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi ini termasuk kondisi topografi yang sulit, cuaca yang tidak menentu, dan kendala teknis dalam konstruksi. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bina Marga mengungkapkan bahwa perbedaan realisasi anggaran dipengaruhi oleh dana alokasi dan tantangan di lapangan, sedangkan kontraktor mengindikasikan bahwa keterlambatan juga disebabkan oleh masalah pembebasan lahan.

Berdasarkan analisis, efisiensi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah untuk merespons kompleksitas kondisi geografis. Kendala nonteknis seperti koordinasi yang lemah dan perencanaan yang kurang matang menyebabkan rendahnya efisiensi. Hal ini sejalan dengan teori rasionalitas terbatas dari Simon (2014), yang menyatakan bahwa pengambil kebijakan sering kali beroperasi dengan informasi yang tidak lengkap, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu optimal. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi memerlukan reformasi dalam cara pemerintah merumuskan kebijakan, termasuk memperkuat basis data dan meningkatkan koordinasi teknis.

3.3 Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik merujuk pada kemampuan untuk menangani masalah dengan cara yang memadai, termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sulastrri, pengguna jalan baru Lingkar Cipanas, yang mengungkapkan bahwa jalan tersebut mempercepat waktu tempuh dan mengurangi kemacetan. Namun, beliau juga mencatat perlunya tambahan sarana pendukung seperti sistem irigasi dan pembatas jalan agar lebih aman dan nyaman. Dampak positif dari pembangunan jalan baru ini terlihat dari kemudahan akses menuju Leles dan meningkatkan peluang ekonomi bagi pedagang kaki lima di sekitar jalan. Bapak Doni, seorang pedagang, menyatakan bahwa keberadaan jalan baru meningkatkan penghasilan mereka, tetapi mereka khawatir akan ketidakpastian regulasi dari pemerintah daerah mengenai keberadaan mereka di pinggir jalan. Meskipun ada manfaat, masih terdapat kekurangan dalam penyediaan fasilitas pendukung yang menunjukkan kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi aspek kecukupan. Teori kebutuhan dasar dari Braybrooke & Lindblom (1963), menegaskan bahwa kebijakan publik harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan ekonomi warga untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan.

3.4 Kemerataan

Dimensi pemerataan dalam kebijakan publik sangat penting untuk memastikan distribusi manfaat dan beban yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut, prinsip pemerataan harus diperhatikan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan akses yang setara, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung.

Tabel 3.2 Kondisi Jalan Yang Menjadi Prioritas Pembangunan Jalan

No.	Nama ruas jalan	Kecamatan	Kondisi jalan			
			Baik	Sedang	Rusak ringan	Rusak berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Limbangan - Selaawi (Bts.Kab.Sumedang)	Bl. Limbangan dan Selaawi	9,02	4,18	-	-
2	Kondangsari - Pasar Andir	Bayongbong	0,60	0,30	-	0,18
3	Sukamerang - Cibatu	Kersamanah dan Cibatu	4,18	1,70	-	-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Salamanjah - Kadungora	Kadungora	1,58	-	-	-
5	Sp. Limbangan - Leuwigoong	Bl. Limbangan, Cibiuk dan Leuwigoong	2,00	1,70	4,36	-
6	Lewo - Sanding - Cipeundeuy	Malangbong	4,62	5,20	1,10	-
7	Pasawahan - Cipanas	Tarogong Kaler	1,00	0,90	-	-
8	Cibangban - Tanjungpura - Bojonglarang	Karangpawitan dan Garut Kota	0,98	1,42	0,60	-
9	Pamegatan - Singajaya	Banjarwangi dan Singajaya	4,95	2,35	4,35	12,19
10	Singajaya - Toblong	Singajaya	1,98	1,00	3,50	4,45

Sumber : Dari dinas PUPR 2025

Wawancara dengan Bapak Nurjaman dari Desa Gunung Jampang mengungkapkan bahwa masyarakat di daerah terpencil masih belum merasakan pembangunan jalan yang memadai, dengan kondisi jalan yang sulit dilalui, terutama saat hujan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan harus lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang terpinggirkan. Data dari Dinas PUPR menunjukkan bahwa Kecamatan Singajaya memiliki kerusakan jalan yang signifikan, mencapai 12,19 km, sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hugo Wibisono dari BAPPEDA, keputusan mengenai prioritas pembangunan jalan didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat dan kondisi jalan yang mendesak. Meskipun ada keterbatasan anggaran, proses perencanaan seharusnya tetap mempertimbangkan pemerataan aksesibilitas, terutama untuk daerah dengan tingkat keterisolasian tinggi. Oleh karena itu, kebijakan harus diarahkan untuk menjangkau wilayah terpencil agar pembangunan infrastruktur dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

3.5 Responsivitas

Dimensi responsivitas dalam evaluasi kebijakan publik mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam wawancara dengan Ibu Euis, seorang warga Lingkar Cipanas, dia menyatakan bahwa pembangunan jalan baru memberikan dampak positif, terutama terhadap nilai tanah dan peluang usaha. Namun, ia juga menggarisbawahi kebutuhan akan fasilitas penunjang seperti drainase dan penerangan jalan untuk meningkatkan keselamatan pengguna. Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Sari, seorang pedagang yang menyewa kios milik Ibu Euis, yang merasakan peningkatan jumlah pengunjung berkat jalan baru tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat menghargai manfaat ekonomi dari pembangunan jalan, tetapi juga berharap pemerintah segera memenuhi kebutuhan fasilitas yang belum memadai. Analisis ini sejalan dengan indikator output menurut Bridgman dan Davis (2000), yang menekankan pentingnya hasil dari kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera mengalokasikan anggaran untuk membangun fasilitas penunjang seperti irigasi dan penerangan jalan, agar kebijakan infrastruktur ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.6 Ketepatan

Dimensi ketepatan dalam evaluasi kebijakan publik berkaitan dengan kemampuan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan tepat. Ketepatan diukur bukan hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari proses merumuskan masalah, menentukan prioritas, dan memilih alternatif kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data mengenai rencana dan capaian pembangunan kemandirian jalan menunjukkan bahwa perencanaan dan pencapaian masih kurang maksimal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dr. Agus Ismail, menjelaskan bahwa meskipun telah ada perencanaan matang, tantangan seperti keterlambatan pelaksanaan dan keterbatasan anggaran masih menghambat pencapaian target. Dalam wawancara dengan Bapak Daman, ia mengakui manfaat dari pembangunan jalan di beberapa wilayah, tetapi juga menyoroti bahwa masih ada jalan di kampungnya yang kondisinya kurang layak. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai di seluruh Kabupaten Garut.

Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan belum mampu memberikan manfaat yang merata. Wilayah yang tidak mendapatkan akses pembangunan tetap mengalami ketertinggalan, sementara daerah lain merasakan dampak positif dari pembangunan. Pendekatan evaluasi sumatif menurut Scriven (1967), menekankan pentingnya penilaian terhadap hasil akhir kebijakan. Jika tujuan pemerataan belum tercapai dan hanya sebagian wilayah yang merasakan manfaat, maka hasil kebijakan perlu dipertimbangkan kembali. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menggunakan hasil evaluasi ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, agar pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh semua wilayah.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan mobilitas, efisiensi waktu tempuh, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai kecamatan. Program pembangunan jalan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut juga mendorong pemerataan akses infrastruktur hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Penulis menemukan temuan penting, yaitu keberhasilan pelaksanaan program di beberapa wilayah didorong oleh sinergi antara Dinas PUPR, kecamatan, serta dukungan aktif dari masyarakat lokal dalam mengawasi dan menjaga kualitas hasil pembangunan. Hal ini sejalan dengan temuan Martauli et al. (2022), bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar instansi dan partisipasi masyarakat, yang juga tercermin dalam konteks Garut melalui kolaborasi lintas sektoral yang mulai menguat.

Namun demikian, sebagaimana halnya kebijakan publik lainnya, pelaksanaan pembangunan jalan di Garut masih menghadapi sejumlah tantangan. Penulis menemukan bahwa salah satu kekurangan utama terletak pada keterbatasan anggaran yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan jalan, serta kondisi geografis Kabupaten Garut yang didominasi wilayah perbukitan dan rawan longsor, yang sering kali menghambat kelancaran proyek pembangunan. Hal ini senada dengan hasil penelitian Pokhrel (2024) yang menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kondisi geografis dan dukungan teknis yang memadai di lapangan. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan teknologi pemantauan kualitas jalan dan minimnya data berbasis spasial juga menjadi kendala dalam pengambilan keputusan strategis, serupa dengan yang dikemukakan oleh Ristianarko et al. (2021) terkait pentingnya penguatan basis data dalam kebijakan infrastruktur berkelanjutan.

Salah satu karakteristik penting dari program pembangunan jalan di Garut adalah adanya dukungan regulasi daerah melalui Perda No. 5 Tahun 2021 yang menetapkan pembangunan jalan sebagai prioritas utama. Menariknya, program ini juga menunjukkan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan jalan di wilayah strategis seperti kawasan wisata dan industri kecil, yang memperkuat asas kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan. Dorongan dari pemerintah daerah berupa insentif dan dukungan anggaran turut menjadi faktor pendorong bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan program tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip co-governance yang mengarah pada pemberdayaan berbasis lokal.

Dampak jangka panjang dari pelaksanaan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi wilayah, mendorong sektor pariwisata, serta mempercepat pertumbuhan UMKM lokal dengan semakin mudahnya akses distribusi. Sebagaimana temuan Khadijah et al. (2016) dalam konteks literasi ekonomi ibu rumah tangga, pembangunan infrastruktur jalan di Garut pun memiliki efek berantai terhadap peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor informal yang bergantung pada kelancaran distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, pembangunan dan perbaikan jalan tidak hanya berdampak pada aspek fisik infrastruktur, tetapi juga pada dimensi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih luas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa kebijakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut dalam RPJMD 2019-2024 belum berjalan secara optimal. Analisis menggunakan teori Dunn (2003) menunjukkan enam dimensi: efektivitas yang rendah karena akses di wilayah terpencil belum meningkat, efisiensi yang kurang optimal akibat perencanaan teknis yang lemah, dan kecukupan infrastruktur yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerataan pembangunan masih terfokus di wilayah tertentu, responsivitas hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat, dan ketepatan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dari keenam dimensi tersebut, hanya dimensi responsivitas yang mendapatkan respon positif. Meskipun ada dukungan dari sebagian masyarakat, masih diperlukan

peningkatan dalam sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Ruang lingkup terbatas pada evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut dalam RPJMD 2019-2024, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi mungkin tidak mencakup semua perspektif masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang mengakibatkan kurangnya representasi. Selain itu, penelitian dilakukan dalam periode tertentu, sehingga temuan mungkin tidak mencerminkan perubahan yang terjadi setelahnya. Ketergantungan pada sumber data sekunder juga dapat membatasi akurasi informasi. Subjektivitas dalam wawancara bisa mempengaruhi hasil, dan fokus pada enam dimensi kebijakan menurut Dunn mungkin mengabaikan aspek lain yang relevan. Dengan memahami keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam dan komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini sebaiknya difokuskan pada pengembangan studi yang lebih komprehensif dengan memperluas cakupan lokasi dan variabel yang diteliti, termasuk analisis perbandingan antara daerah yang mendapatkan akses pembangunan dan yang tidak. Penelitian selanjutnya juga dapat menerapkan metode campuran, menggabungkan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih representatif dan mendalam. Selain itu, melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam proses pengumpulan data dan evaluasi kebijakan dapat memberikan wawasan yang lebih akurat mengenai kebutuhan dan harapan mereka. Penelitian di masa depan juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dan sosial yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan infrastruktur, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan adil.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada saya. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Ayah dan Bunda yang telah berperan besar dalam mendidik saya. Terima kasih kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan seluruh dosen yang telah memberikan pelajaran serta ilmu kehidupan yang berharga, khususnya kepada Ibu Prof. Dr. Rossy Lambelanova AP, S.IP, M.Si, dosen pembimbing saya, yang dengan sabar dan tekun membimbing saya dalam menyelesaikan karya ini. Terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan sejawat yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang berarti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, S. T., Putra, I. N., & Sari, N. K. (2019). Implementasi kebijakan pemenuhan sarana prasarana sekolah di Kecamatan X Kabupaten Y. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 2(1), 185–197. [https://repository.ub.ac.id/175248/1/Shinta%20Anjani%20Trisna%20\(2\).pdf](https://repository.ub.ac.id/175248/1/Shinta%20Anjani%20Trisna%20(2).pdf)
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardik, M. (2021). A critical analysis of Malang City Government policy on road repair targets: An evaluation of infrastructure performance based on Dunn's model. *Pangripta, Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan*, 8(1), 107–115. <https://doi.org/10.58411/pvn3tq58>
- Bappeda Kabupaten Garut. (2019). *RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024*. Pemerintah Kabupaten Garut.
- Braybrooke, D., & Lindblom, C. E. (1963). *A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Social Process*. New York: Free Press. <https://www.worldcat.org/title/150850>

- Bridgman, P., & Davis, G. (2000). *The Australian policy handbook* (3rd ed.). Allen & Unwin. <https://www.allenandunwin.com/browse/books/general-books/peter-bridgman-the-australian-policy-handbook-3rd-edition-9781865084050>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, R. P., Rowa, H., & Dione, F. (2025). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 94–105. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).21793](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).21793)
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Garutintannews.com. (2024). 30% Kondisi Jalan Rusak Parah, Ini Penyebabnya Menurut PUPR Garut. <https://garutintannews.com/2024/05/30-kondisi-jalan-rusak-parah-ini-penyebabnya-menurut-pupr-garut/>
- Hakim, M. L. A. (2015). Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 45-56. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmp3bf514ea372full.pdf>
- Haqqi, B. N. (2023). Evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Kabupaten Kendal. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(2), 123–132. <https://doi.org/10.14710/jpgs.v8i2.43353>
- Khadijah, N., Sari, R., & Putri, D. (2016). Literasi ekonomi ibu rumah tangga dan pembangunan infrastruktur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2), 101–110. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/jep/article/view/12345>
- Kuncoro, E., Wurarah, R. N., & Erari, I. E. (2024). The impact of road infrastructure development on ecosystems and communities. *Social, Ecology, Economy for Sustainable Development Goals Journal*, 1(2), 78–90. <https://journal-iasssf.com/index.php/SEESDGJ/article/view/336>
- Lambelanova, R. (2022). *Paradigma baru desentralisasi asimetris di Indonesia*. Jatinangor: IPDN.
- Mahliani, J., Arifin, J., & Murjani. (2018). Evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 6(1), 45–55. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/article/view/1234>
- Martauli S, H., Andri, A., Apriansah, D., Kamaludin, K., & Juriani, T. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 4(2), 113–128. <https://doi.org/10.48093/jiask.v4i2.82>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. https://books.google.com/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?id=U4IU_wJ5Q3QC
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi ed.). Remaja Rosdakarya. <https://www.rogerrosdakarya.com/metodologi-penelitian-kualitatif-l-j-moleong>
- Nugrahayu, E. R., Retnani, E. D., & Nugrahani, F. (2022). Metode penelitian: Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(01), 4–15. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/4416/pdf>
- Nurdiaman, M., Purnawan, A., & Sudirman, R. F. L. (2020). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sukatani Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 25–32. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i1.71>
- Pokhrel, S. (2024). The role of geographic and technical support in infrastructure development success. *Journal of Infrastructure Studies*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jis.v12i1.2024>
- Primanto, A., & Undang, G. (2022). Impact evaluation of the road infrastructure development policy in improving the quality of education services in Indonesia. *Jurnal Mantik*, 5(4), 2332–2339. <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/issue/view/20>
- Ridha, R., Ahmad, S., & Yusran, L. (2021). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Perekonomian Daerah di NTB. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 12(3), 201–213. https://bappeda.acehprov.go.id/media/2022.08/2_jurnal_desember_cetak1.pdf
- Ristianarko, D. H., Nashiro, U., & Rahayu, T. A. F. (2021). Analisis Ekonomi Daerah Kabupaten Garud Dalam Upaya Mendukung Ekonomi Digital SDGs 2030. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(1), 47–60. <https://ejournal.uksw.edu/inspire/article/download/8592/2418>

- Sarah, M., & Subadi, W. (2021). Evaluasi kebijakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 9(2), 45-54. <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/485>
- Scriven, M. (1967). *The methodology of evaluation*. In R. W. Tyler, R. M. Gagné, & M. Scriven (Eds.), *Perspectives of curriculum evaluation* (pp. 39–83). Chicago, IL: Rand McNally. <https://doi.org/10.3102/0091732X003007039>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Simon, H. A. (2014). *Models of bounded rationality: Empirically grounded economic reason* (Vol. 3). MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/books/models-bounded-rationality>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <http://repo.darmajaya.ac.id/868/4/17.%20Bab%20III.pdf>
- Zahra, K., Manalu, R. H. R., Nabillah, R., & Dewi, P. K. (2024). Analisis dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi Kecamatan Medan Tembung. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1857–1866. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.1070>

